

Modul 4

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Modul Dasar Kawasan Konservasi Berbasis
Hiu Paus di Teluk Saleh



KONSERVASI
INDONESIA

© **HAK CIPTA** Buku ini boleh digunakan untuk penelitian, pengajaran, studi pribadi, dan tujuan non komersial lainnya, dengan syarat disebutkan sumbernya. Materi yang dimuat dalam publikasi ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilindungi oleh hak cipta.

Rekomendasi sitasi: Nadia, M., I. Syakurachman., & M. I. H., Putra. (2025). Modul 4: Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Modul Dasar Kawasan Konservasi Berbasis Hiu Paus di Teluk Saleh. Jakarta: Konservasi Indonesia (KI)



**KONSERVASI
INDONESIA**

Modul 4

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Tim Penulis:

Maula Nadia

Ismail Syakurachman

Mochamad Iqbal Herwata Putra

Illustrator:

Ryannyka Dwi

Tata Letak:

Maula Nadia

Didukung oleh:



Supported by:

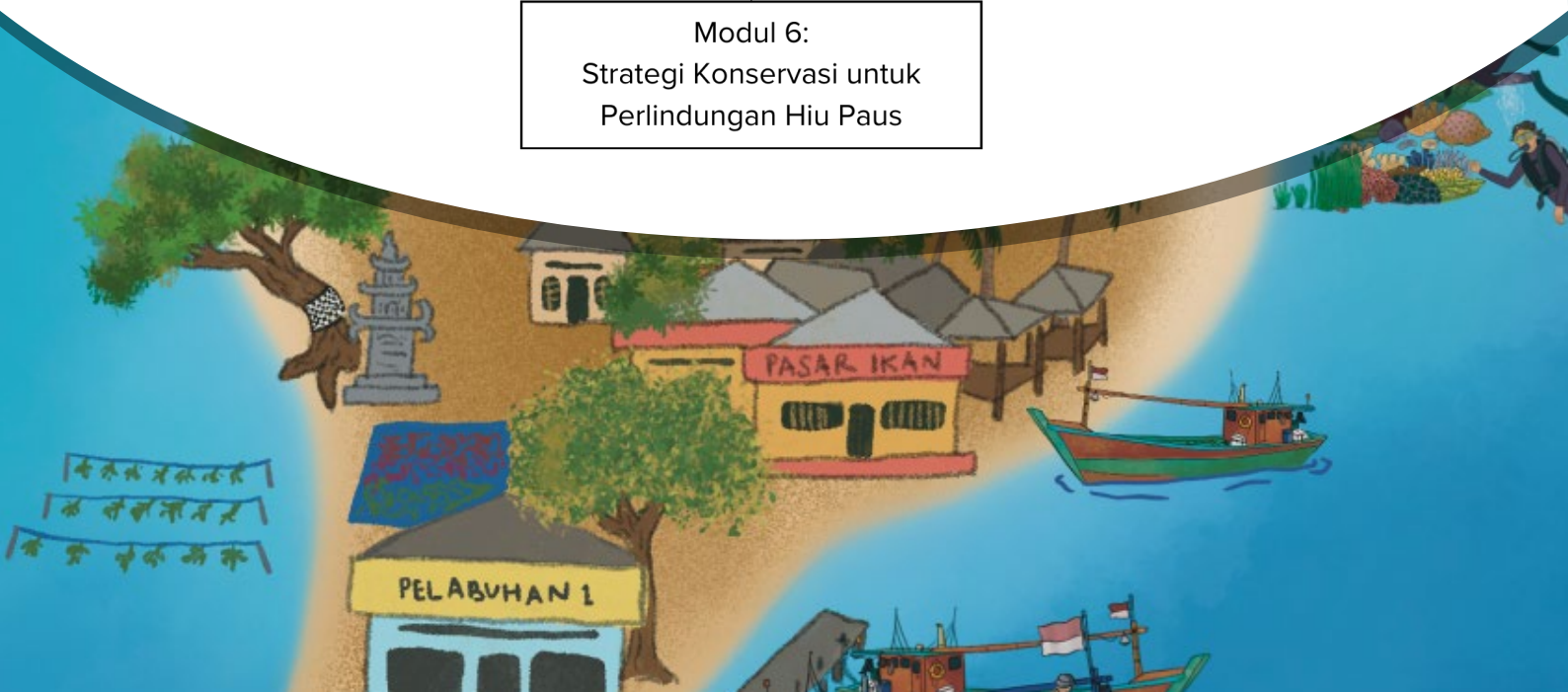
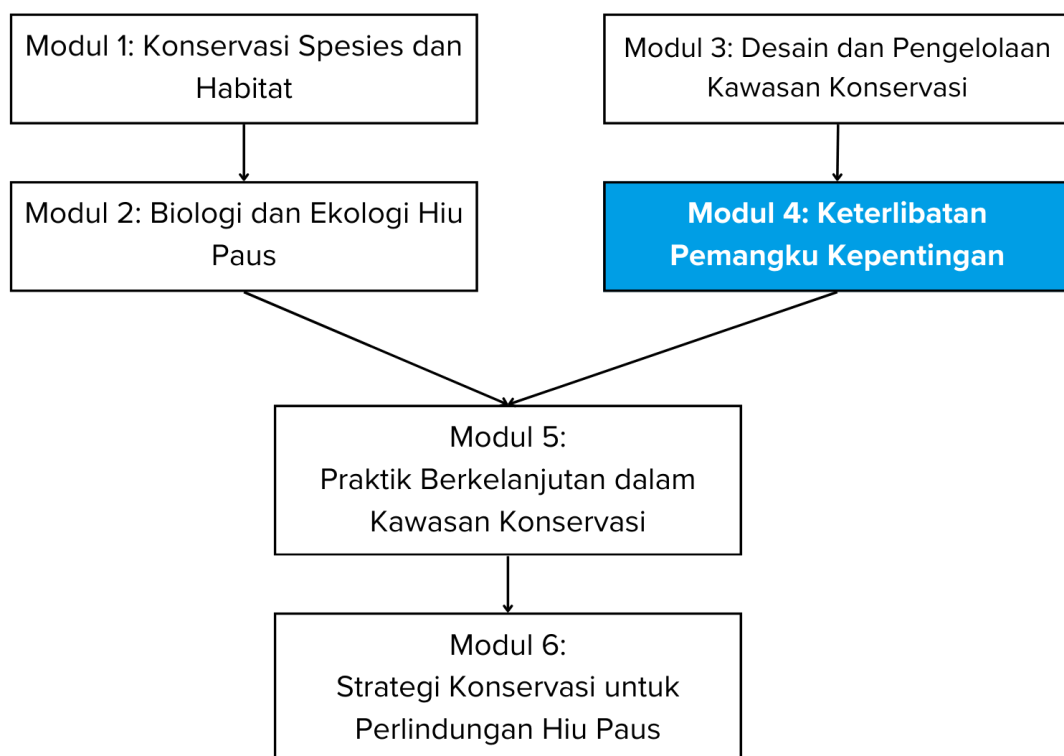


based on a decision of
the German Bundestag

Tinjauan Umum

Modul 4: Keterlibatan Pemangku Kepentingan membahas tentang peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembentukan dan pengelolaan sebuah kawasan konservasi. Keberhasilan sebuah kawasan konservasi memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan, khususnya masyarakat lokal yang secara historis telah menempati kawasan tersebut. Dalam modul ini, peserta akan memahami bagaimana setiap pemangku kepentingan memiliki peran esensial, maka komunikasi dan kolaborasi yang baik dibutuhkan untuk mencapai tujuan kawasan konservasi.

Modul ini adalah bagian dari rangkaian Modul Dasar Kawasan Konservasi Berbasis Hiu Paus di Teluk Saleh:



Daftar Isi

Tinjauan Umum

Daftar Isi

Struktur modul	
Panduan penggunaan modul	
4.1. Pendahuluan	1
Tujuan pembelajaran	2
4.2. Peran Pemangku Kepentingan	3
Manfaat pelibatan pemangku kepentingan	3
Jenis pemangku kepentingan	7
4.3. Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan	12
4.4. Pendekatan Pengelolaan	14
Pengelolaan bersama (<i>co-management</i>)	15
Lampiran	
Glosarium	20
Evaluasi Pembelajaran	21
Referensi	23

Struktur modul

Modul ini dilengkapi dengan sejumlah bagian tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran, yaitu:

Catatan Pelatihan	Panduan untuk instruktur yang ingin menggunakan modul ini untuk kegiatan pelatihan
Pojok Informasi	Informasi tambahan tentang materi modul
Kegiatan	Kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk mengaplikasikan materi modul
Refleksi	Pertanyaan interaktif untuk memicu pemikiran kritis Anda tentang materi modul

Panduan penggunaan modul

Sesi pembelajaran modul dapat dibagi ke dalam beberapa segmen dengan estimasi total waktu 135 menit atau setara dengan 3 JP (1 jam pembelajaran = 45 menit). Tergantung pada ketersediaan waktu pelatihan dan peserta, pembelajaran modul dapat dilaksanakan per segmen.

Rekomendasi segmen sesi pembelajaran:

Segmen 1 (1 JP)

- 4.1. Pendahuluan
- 4.2. Peran Pemangku Kepentingan

Istirahat

Segmen 2 (2 JP)

- 4.3. Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan
 - 4.4. Pendekatan Pengelolaan
- Penutup

Catatan Pelatihan:

Jika pembelajaran modul dipecah ke dalam dua sesi, instruktur dapat memberikan rangkuman materi segmen 1 (sesi pertama) sebelum memulai segmen 2.

Pertanyaan pemantik rangkuman segmen 1, namun tidak terbatas pada:

- Apa yang dimaksud dengan pemangku kepentingan?
- Sebutkan kategori pemangku kepentingan! Apa peran mereka dalam pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi?
- Mengapa pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi?

Tujuan: Menyegarkan ingatan peserta dan memberikan konteks, sehingga menciptakan transisi yang baik ke segmen berikutnya.

4.1.

Pendahuluan

Catatan Pelatihan: Instruktur dapat memulai sesi pelatihan dengan kegiatan *ice breaking*

Petunjuk: Peserta berdiri membentuk lingkaran. Instruktur membawa satu barang (misal, bola) yang bisa dilempar atau dioper ke peserta lain. Selanjutnya, instruktur menentukan satu alfabet. Setiap peserta yang menerima barang harus secara cepat menyebutkan nama benda yang dimulai dari huruf/alfabet tersebut. Barang dioper ke peserta lainnya hingga waktu selesai.

Tujuan: Membantu menciptakan lingkungan yang santai di mana peserta berbagi ide dan berpartisipasi lebih penuh selama sesi pembelajaran

Kita, manusia, sangat bergantung pada lingkungan laut. Di saat yang sama, kegiatan manusia juga mampu mempengaruhi kondisi lingkungan laut. Dengan hubungan ini, setiap upaya konservasi (misal, pembentukan kawasan konservasi) harus melibatkan seluruh manusia yang berhubungan dengan lingkungan laut tersebut - secara langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan upaya konservasi sering kali bergantung pada dukungan pihak-pihak yang terlibat ini atau yang disebut sebagai pemangku kepentingan.

Pada modul ini, kita akan membahas tentang peran dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dalam pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Refleksi

Sekarang, pikirkan tentang lingkungan laut di daerah Anda..

Siapa yang akan terdampak jika ada upaya konservasi?



Catatan Pelatihan: Instruktur bertanya langsung kepada peserta sebagai pertanyaan pemantik

Tujuan pembelajaran

Pada akhir pembelajaran modul, Anda dapat:

- Memahami pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam upaya konservasi
- Memahami pentingnya integrasi pengetahuan lokal dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi
- Mengidentifikasi pemangku kepentingan
- Mendiskusikan strategi pelibatan pemangku kepentingan



JEJARING KONSERVASI HIU PAUS TELUK SALEH BERBASIS MASYARAKAT

Peran Pemangku Kepentingan

Pada akhir [Modul 3. Desain dan Pengelolaan Kawasan Konservasi](#), istilah **pemangku kepentingan** sudah diperkenalkan. Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pelaksanaan dan pencapaian tujuan kawasan konservasi (Freeman, 1984).

Meskipun kawasan konservasi telah dikaitkan dengan keberhasilan biologis dan ekologis, **kawasan konservasi sering kali menghadapi penolakan lokal karena adanya pembatasan dalam berkegiatan** (misal, penangkapan ikan). Kurangnya dukungan atau penerimaan publik dapat terjadi, terutama jika ada persepsi bahwa manfaat kawasan konservasi laut tidak dibagi secara merata di antara para pemangku kepentingan (Agardy et al., 2003; Christie et al. 2003; Christie, 2004). Bentuk penolakan juga bisa dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi kawasan konservasi. Jika ada terlalu banyak penolakan, upaya perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi dapat menjadi gagal (Voyer, Gladstone & Goodall, 2014). Oleh karena itu, **keberhasilan suatu kawasan konservasi sering kali bergantung pada dukungan berkelanjutan dari para pemangku kepentingan**.

Manfaat pelibatan pemangku kepentingan

Secara garis besar, melibatkan pemangku kepentingan adalah salah satu cara efektif untuk mendapatkan dukungan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif dapat:

- Menghasilkan keputusan yang lebih didukung, aturan yang lebih mungkin diikuti, dan hasil yang memenuhi tujuan pengelolaan (Dalton et al., 2012)
- Meningkatkan kepercayaan, kepuasan, dan kapasitas antara lembaga publik dan instansi pemerintah (Dietz dan Stern, 2008; Beierle dan Cayford, 2002)

- Meningkatkan kualitas rencana pengelolaan secara keseluruhan dengan menggabungkan nilai-nilai publik dan pengetahuan lokal (Newig dan Fritsch, 2009)
- Meningkatkan rasa kepemilikan yang lebih besar
- Membangun hubungan dan kemitraan

Pemangku kepentingan dapat dibagi ke dalam beberapa kategori umum, dimana **masing-masing memiliki peran dan bentuk keterlibatan yang berbeda**:



Masyarakat lokal

Penduduk setempat yang secara turun temurun sudah menempati kawasan tersebut memiliki koneksi paling dekat dengan lingkungan perairan. Mayoritas masyarakat pesisir bergantung pada perikanan, pariwisata, dan sumber daya laut lainnya untuk mata pencaharian mereka. Melibatkan masyarakat memastikan bahwa kebutuhan dan perhatian mereka dipertimbangkan dalam desain kawasan konservasi, terutama dalam hal keputusan zonasi dan hak akses.

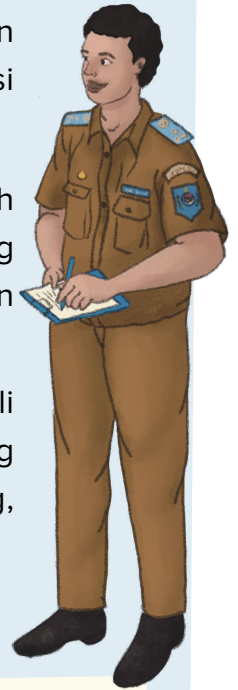
- **Pengetahuan lokal:** Masyarakat setempat dan adat dapat memberikan pengetahuan yang tak ternilai tentang ekosistem laut, perilaku spesies, dan penggunaan sumber daya secara historis. Pengetahuan ini dapat menunjukkan faktor-faktor penting yang harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi (misal, kondisi ekologi tertentu, konflik antar masyarakat). Integrasi pengetahuan lokal mampu meningkatkan penerimaan kawasan konservasi di kalangan masyarakat (Mellado et al., 2013). Maka, dapat membantu menciptakan kawasan konservasi yang mencerminkan realitas sosial - ekologis dan menghargai praktik budaya setempat.



Instansi pemerintah

Instansi pemerintah memiliki peran penting dalam pembentukan, pengelolaan, dan pemantauan kawasan konservasi. Tata kelola yang kuat dapat mempengaruhi perilaku manusia dan mengurangi dampak pada ekosistem laut dan pesisir sangat penting agar kawasan konservasi benar-benar efektif (Kriegl et al., 2021). Instansi pemerintah bekerja di berbagai sektor — seperti perikanan, pariwisata, dan konservasi — untuk memastikan bahwa kebijakan kawasan konservasi terintegrasi dengan tujuan nasional atau regional yang lebih luas.

- **Kebijakan dan regulasi:** Pemerintah nasional dan daerah bertanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum yang menetapkan kawasan konservasi, menegakkan regulasi, dan memastikan kepatuhan.
- **Pendanaan dan sumber daya:** Pemerintah seringkali menyediakan sumber daya keuangan dan manusia yang diperlukan untuk mengelola kawasan konservasi jangka panjang, termasuk patroli, pemantauan, dan penelitian.



Sektor perikanan

Tokoh dari sektor perikanan seperti nelayan, baik nelayan skala kecil (tradisional) maupun komersial, merupakan pemangku kepentingan utama karena ketergantungan mereka pada sumber daya laut. Melibatkan mereka dalam perancangan kawasan konservasi dapat meningkatkan dukungan dalam implementasi praktik penangkapan ikan berkelanjutan dan memastikan bahwa kawasan konservasi tidak dianggap sebagai ancaman bagi mata pencaharian mereka.

- **Pengelolaan tangkapan:** Mereka berperan dalam meminimalkan dampak dari kegiatan perikanan, seperti tangkapan sampingan spesies yang terancam punah atau kerusakan habitat akibat peralatan penangkapan ikan. Kolaborasi pengelolaan bersama tokoh sektor perikanan memastikan bahwa peraturan yang dibuat bersifat praktis dan dapat dilaksanakan.





Sektor pariwisata

Jika ada kegiatan pariwisata di dalam kawasan konservasi, operator wisata juga termasuk ke dalam jajaran pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan mereka bergantung pada lingkungan laut dan sebaliknya kegiatan mereka pun mampu mempengaruhi lingkungan laut. Maka pelibatan pemangku kepentingan dari sektor pariwisata dapat membantu meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pariwisata di dalam kawasan.



- **Pengelolaan pariwisata:** Operator pariwisata dapat bekerja sama dengan pengelola kawasan konservasi untuk merancang program pariwisata yang dapat mendukung pendapatan masyarakat setempat. Selain itu, mereka mengambil peran dalam mempromosikan dan menjalankan kebijakan kawasan konservasi bersama para wisatawan.



Sektor swasta

Sektor swasta adalah individu atau organisasi yang tidak berada di bawah pemerintahan. Mereka bisa berbentuk termasuk bisnis atau usaha yang dijalankan oleh individu atau perusahaan yang berhubungan dengan kawasan konservasi dan/atau sumber daya yang berasal dari kawasan konservasi.

- **Mitigasi dampak:** Bisnis yang beroperasi di dekat atau di dalam kawasan konservasi memiliki kepentingan dalam mempromosikan praktik berkelanjutan untuk meminimalkan dampak mereka terhadap lingkungan (misal, polusi, perusakan habitat).
- **Pendanaan dan sumber daya:** Membantu menyediakan alternatif pendapatan baru untuk masyarakat. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dapat mendorong investasi dalam pengembangan kawasan dan upaya konservasi (Bottema dan Bush, 2012).



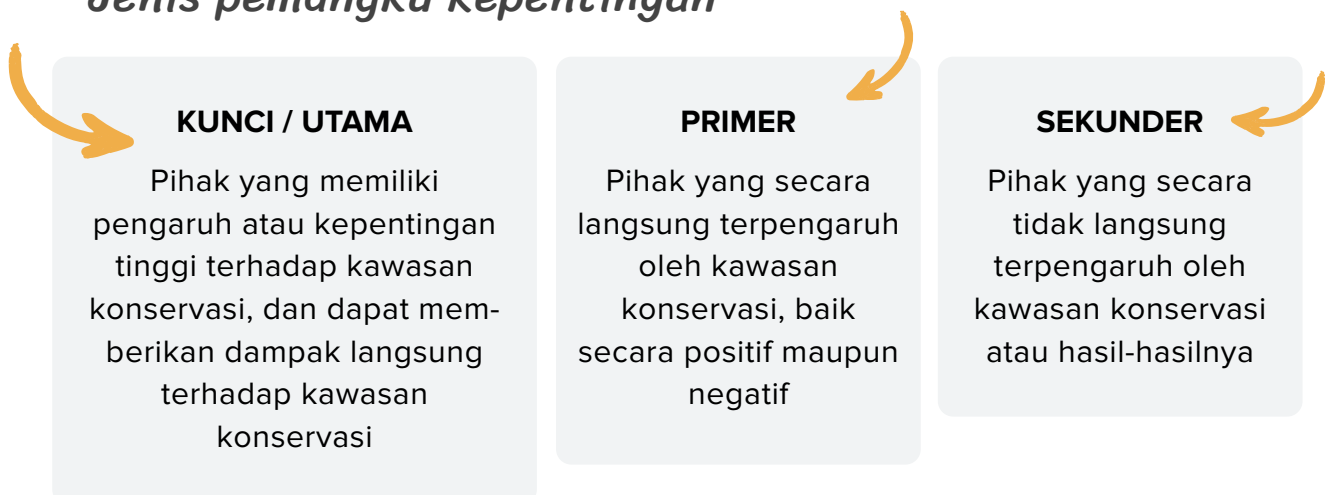
LSM dan peneliti

Lembaga swadaya masyarakat (LSM), peneliti konservasi, dan akademisi memainkan peran penting dalam aspek ilmiah dan teknis pengelolaan kawasan konservasi. Mereka dapat mendukung pihak instansi pemerintah dalam pengelolaan kawasan secara langsung maupun tidak langsung.

- **Penelitian dan pemantauan:** Menyediakan data tentang populasi spesies, kesehatan habitat, dan efektivitas strategi pengelolaan kawasan konservasi. Informasi ini penting untuk membuat keputusan yang tepat dan mengadaptasi kebijakan kawasan lindung laut berdasarkan bukti.
- **Advokasi dan kesadaran publik:** Membantu mengadvokasi pembentukan kawasan konservasi dan mengedukasi masyarakat tentang manfaatnya. Mereka dapat membantu membangun dukungan publik, mempengaruhi kebijakan, dan mengamankan pendanaan untuk inisiatif kawasan.

Pelibatan pemangku kepentingan lokal bersifat krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Ketergantungan mereka terhadap sumber daya laut seringkali membawa mereka untuk memiliki informasi terbaik tentang sumber daya lokal, komitmen paling tinggi terhadap pemanfaatan berkelanjutan, dan dengan demikian **akan mengembangkan praktik pengelolaan yang lebih efektif dan tepat untuk mencapai tujuan konservasi** (Voorberg dan Van der Veer, 2020).

Jenis pemangku kepentingan



Sumber: Tractivity, 2024; Rabinowitz, 2023

Refleksi

Menurut Anda, siapa yang termasuk ke dalam pemangku kepentingan “kunci”, “primer”, dan “sekunder” dalam pengelolaan kawasan perairan di daerah Anda?



Catatan Pelatihan: Instruktur bertanya langsung kepada peserta sebagai pertanyaan interaktif. Ini akan menjadi jembatan untuk ke kegiatan selanjutnya.

Pojok Informasi: Budaya Sasi di Teluk Wondama



Integrasi adat atau pengetahuan lokal bisa menjadi sangat bermanfaat untuk upaya konservasi. Di Indonesia, ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena ada sejumlah hukum adat dan budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun untuk pengelolaan laut. Salah satunya adalah budaya Sasi.

Sasi pada prinsipnya merupakan larangan pengambilan sumber daya tertentu pada waktu tertentu. Dalam pengelolaan Sasi di Teluk Wondama (Provinsi Papua Barat), terdapat masa buka dan masa tutup. Masa buka diartikan sebagai masa pemanfaatan diperbolehkan dilakukan, sedangkan masa tutup diartikan masa di mana penerapan pelarangan pada wilayah Sasi dilakukan.

Gambar 1. Masyarakat adat di Kampung Menarbu bersama Bupati Teluk Wondama melaksanakan prosesi buka Sasi laut. Pada kegiatan tersebut masyarakat berpesta menangkap ikan serta hewan laut lain dengan mudah (Sumber: Antaranews.com/Toyiban)



Pengelolaan Sasi disana mengenal istilah tiga pilar, yaitu adat, gereja, dan pemerintah (desa/daerah). Keterlibatan tiga kelompok sosial dalam pengelolaan kawasan konservasi mengundang partisipasi yang tinggi dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Pengelolaannya dilakukan secara bersama di bawah pemerintahan desa, dengan kepala desa, tokoh agama, dan tokoh adat sebagai pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok bertanggung jawab terhadap kegiatan sehari-hari kelompok pengelola seperti patroli, pengawasan, dan administrasi. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan patroli juga dilakukan secara sukarela oleh masyarakat sekitar, menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Praktik pengelolaan ini berhasil memberikan dampak positif terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam laut disana.

Sumber: Gusman dan Supriyadi (2024)



Kegiatan Pembelajaran Interaktif:
Analisis pemangku kepentingan

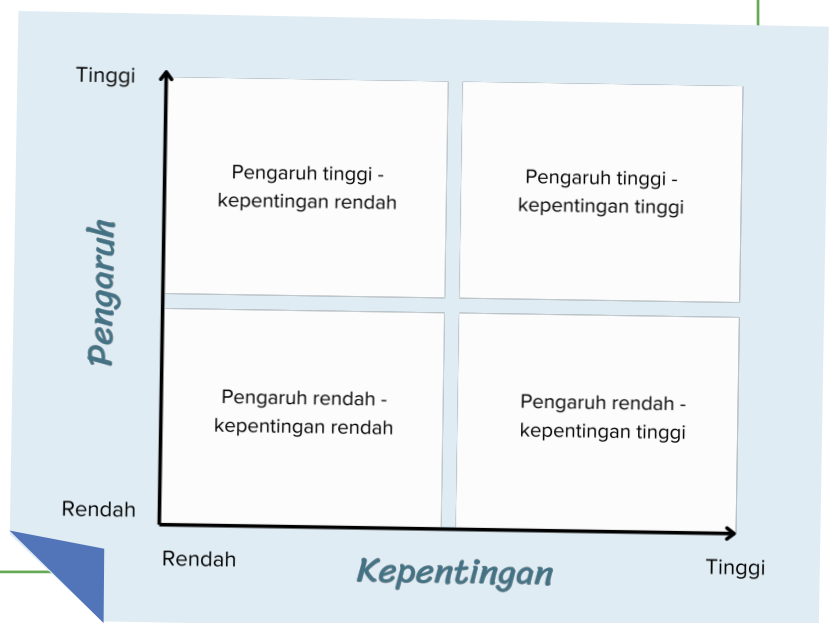
Anda akan mengidentifikasi individu, kelompok, dan instansi utama yang akan terlibat dalam skema pengelolaan kawasan konservasi untuk konservasi hiu paus di Teluk Saleh, serta menjelaskan peran mereka.

Petunjuk:

1. Identifikasi pemangku kepentingan (misal, individu, kelompok, maupun lembaga) yang terlibat dalam pengelolaan kawasan perairan Teluk Saleh. Pertanyaan panduan, namun tidak terbatas pada:
 - a. Siapa yang akan mendukung upaya konservasi?
 - b. Siapa yang mungkin akan diuntungkan atau dirugikan dari upaya konservasi?
2. Analisa tingkat ketertarikan dan dukungan setiap pemangku kepentingan terhadap pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi dengan menggunakan tabel di bawah:

Pemangku kepentingan	Tingkat dukungan pada upaya konservasi	Peran			Alasan
		Perlindungan	Pemanfaatan	Pelestarian	
<i>contoh: Operator wisata hiu paus</i>	<i>Sangat mendukung</i>	<i>Melaksanakan praktik wisata yang tidak mengganggu hiu paus</i>	<i>Menggunakan hiu paus sebagai objek utama dalam pariwisata</i>	<i>Melaksanakan praktik wisata yang tidak mengganggu hiu paus</i>	<i>Sektor pariwisata bisa semakin berkembang jika hiu paus dan habitatnya sehat</i>

3. Tuangkan hasil tabel di atas ke dalam matriks analisis pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi posisi setiap pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kekuasaan dan minat terhadap konservasi.



Catatan Pelatihan:

Alat dan Bahan: Kertas A0 dengan gambar matriks analisis pemangku kepentingan (1 untuk satu sesi pembelajaran); spidol/pena berwarna; kertas post-it (warna berbeda untuk setiap kelompok)

Panduan: Instruktur dapat membagi peserta ke dalam kelompok kecil berisikan 3 - 4 orang. Arahkan peserta untuk menuliskan setiap nama pemangku kepentingan dalam satu kertas post-it, lalu tempelkan pada matriks.

Pertanyaan panduan diskusi, namun tidak terbatas pada:

- Hasil apa yang dapat dipetik dari matriks ini?
- Mengapa pemangku kepentingan “A” diletakan di kuadran tersebut?
- Siapa saja pemangku kepentingan kunci di dalam matriks?

Setelah sesi diskusi selesai, instruktur dapat menjelaskan lebih dalam tentang matriks analisis pemangku kepentingan dan makna dari setiap kuadran (lihat Pojok Informasi: Matriks Analisis Pemangku Kepentingan)

Catatan: Hasil akan digunakan pada kegiatan selanjutnya

Waktu: 20 menit + 5 menit diskusi



Pojok Informasi: Matriks analisis pemangku kepentingan

Matriks ini adalah alat yang digunakan untuk mengategorikan dan mengelola pemangku kepentingan berdasarkan tingkat minat dan pengaruh/kekuasaan mereka dalam suatu proyek atau inisiatif, seperti pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi. Matriks ini mampu membantu mengidentifikasi cara melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan secara efektif. Dalam matriks ini, pemangku kepentingan dibagi sepanjang dua sumbu:

- Sumbu X: Minat – Tingkat di mana pemangku kepentingan tertarik atau terpengaruh oleh KKP.
- Sumbu Y: Pengaruh – Kemampuan pemangku kepentingan untuk mempengaruhi keputusan atau hasil.

4 Kuadran Matriks:

1. Pengaruh Tinggi, Kepentingan Tinggi (Kelola dengan dekat):

Para pemangku kepentingan ini sangat berpengaruh dan sangat tertarik pada kawasan konservasi. Mereka harus terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan harus terus diberi informasi.

Contoh: Lembaga pemerintah, pemimpin daerah

2. Pengaruh Tinggi, Kepentingan Rendah (Pertahankan kepuasan):

Para pemangku kepentingan ini memiliki pengaruh yang signifikan tetapi mungkin tidak terlibat langsung atau peduli dengan operasi harian. Tetap beritahu mereka untuk mempertahankan dukungan mereka.

Contoh: Pemerintah nasional, LSM besar

3. Pengaruh Rendah, Kepentingan Tinggi (Berikan informasi):

Para pemangku kepentingan ini sangat berinvestasi tetapi memiliki pengaruh yang kecil. Pembaruan dan keterlibatan rutin akan membuat mereka tetap mendukung.

Contoh: Nelayan lokal, operator wisata

4. Pengaruh Rendah, Kepentingan Rendah (Pantau):

Para pemangku kepentingan ini memiliki minat minimal dan sedikit kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Mereka hanya memerlukan pemantauan minimal dan pembaruan sesekali.

Contoh: Masyarakat umum, wisatawan sesekali

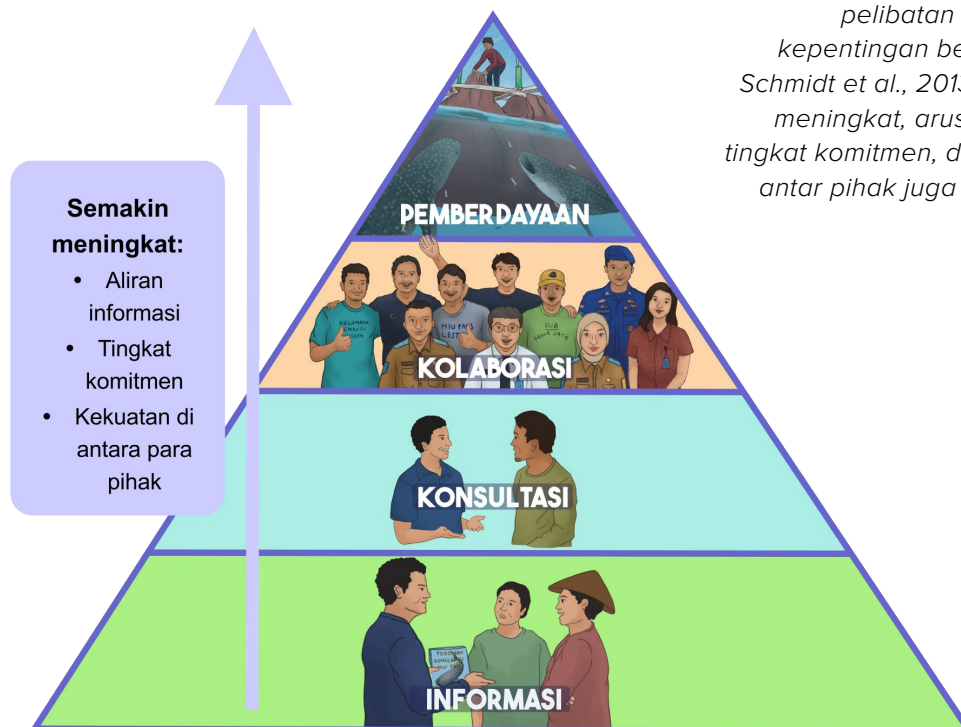
Sumber: Mindtools, 2004; Bottorff dan Hoory, 2022

Analisis pemangku kepentingan bisa membantu memprioritaskan strategi keterlibatan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi dan dukungan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

4.3.

Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan analisis di atas, kita sudah mengetahui bahwa ternyata setiap pemangku kepentingan memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, **masing-masing membutuhkan strategi pendekatan dan pelibatan yang berbeda**. Berdasarkan Schmidt et al. (2013), terdapat 4 (empat) tingkat pelibatan pemangku kepentingan:



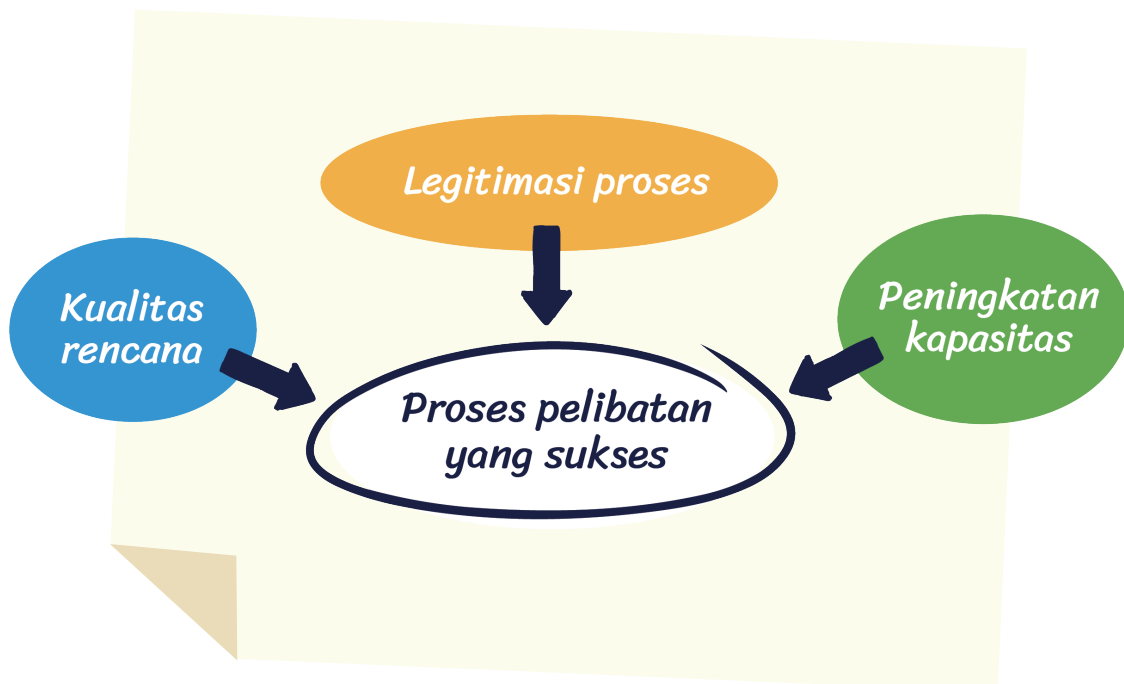
Gambar 2. Empat tingkat pelibatan pemangku kepentingan berdasarkan Schmidt et al., 2013. Semakin meningkat, arus informasi, tingkat komitmen, dan otoritas antar pihak juga meningkat

Berikut adalah beberapa strategi yang bisa digunakan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam upaya konservasi:

- **Konsultasi dan partisipasi:** Libatkan pemangku kepentingan sejak awal dalam proses perancangan kawasan konservasi melalui lokakarya, konsultasi publik, dan pengambilan keputusan partisipatif.
- **Penyelesaian konflik:** Atasi konflik antara pemangku kepentingan (misalnya, nelayan vs. kelompok konservasi) melalui negosiasi, kompromi, dan mediasi.

- **Saluran komunikasi:** Tetapkan mekanisme komunikasi yang jelas antara pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan berjalannya arus informasi. Salah satu contohnya termasuk membagikan informasi hasil riset/penelitian kepada masyarakat.

Dietz dan Stern (2008) menemukan bahwa proses pelibatan pemangku kepentingan yang sukses seringkali ditunjukkan dengan adanya komponen legitimasi (aturan yang berlaku atau adanya pengakuan formal dalam keterlibatan), kualitas rencana pelibatan, dan pengembangan kapasitas. Menurut mereka, partisipasi publik adalah cara untuk melegitimasi proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas hasil. Misalnya, dengan meningkatkan legitimasi proses musyawarah, hasil (misalnya, rencana pengelolaan kawasan konservasi) juga akan sah dan berkualitas lebih tinggi; dan dapat mengarah pada pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam bentuk **pemahaman dan kepercayaan yang selanjutnya mengarah pada hasil sosial yang lebih baik** (Dietz dan Stern, 2008).

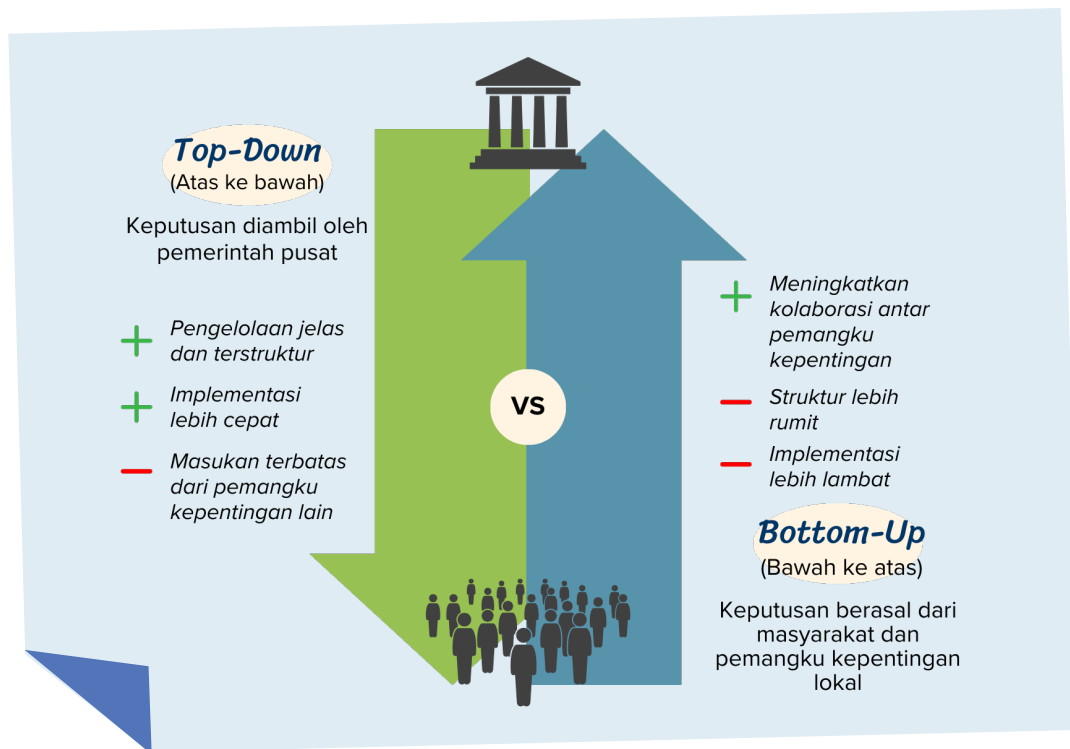


Gambar 3. Kerangka konsep pelibatan pemangku kepentingan (diadaptasi dari Dietz dan Stern, 2008)

4.3. Pendekatan Pengelolaan

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, terdapat dua pendekatan utama yang sering ditemukan: pengelolaan **top-down approach** (pendekatan atas ke bawah) dan **bottom-up approach** (pendekatan bawah ke atas).

- **Top-down** melibatkan arahan, aturan, dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pusat, seperti pemerintah, yang diberlakukan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan setempat. **Pemerintah memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan** dan pelaksanaan pengawasan dengan partisipasi publik yang terbatas (Gaymer et al., 2014).
- **Bottom-up** dicirikan dengan pelibatan pemangku kepentingan. **Pendekatan ini umumnya berbasis masyarakat**, di mana masyarakat dan pemangku kepentingan setempat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, penetapan aturan, dan penegakan hukum (Gaymer et al., 2014; Sayce et al., 2013).



Gambar 4. Perbandingan antara dua pendekatan pengelolaan: top-down (atas ke bawah) dan bottom-up (bawah ke atas)

Refleksi

Menurut Anda, dalam kondisi apa pendekatan *top-down* dibutuhkan? Bagaimana dengan *bottom-up*?

Catatan Pelatihan: Instruktur bertanya langsung kepada peserta sebagai pertanyaan interaktif.

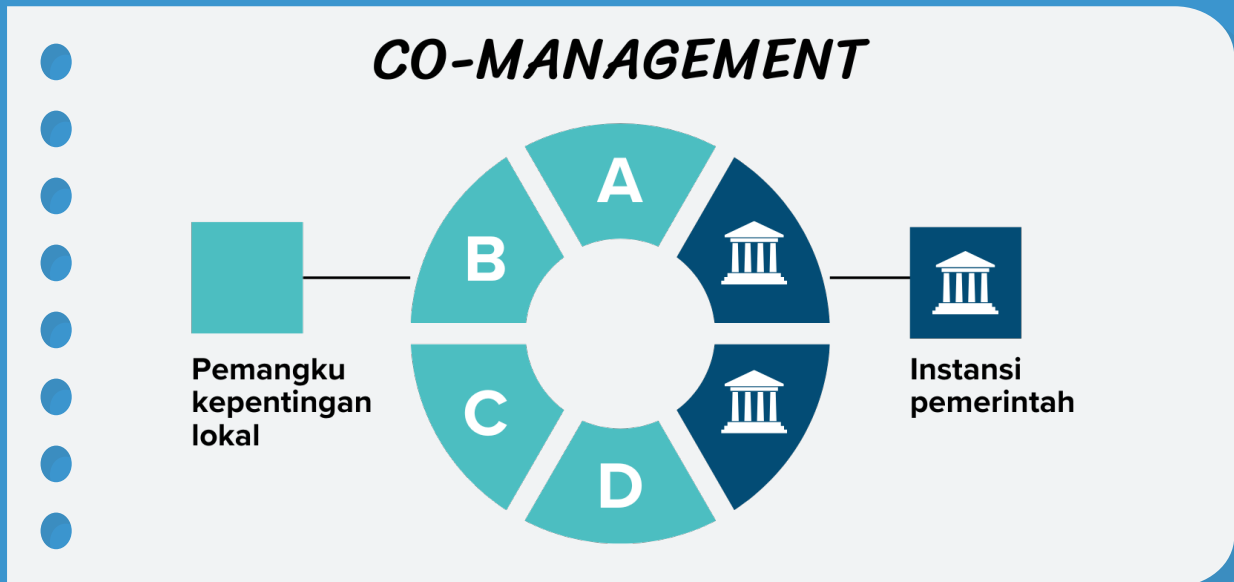
Pengelolaan bersama (Co-management)

Salah satu bentuk integrasi dari kedua pendekatan pengelolaan di atas adalah **pengelolaan bersama (*co-management*)**. *Co-management* mengacu pada **suatu pengaturan di mana tanggung jawab pengelolaan dibagi antara pemerintah dan kelompok pengguna** (Carlson dan Berks, 2005). Dalam pendekatan ini, masyarakat lokal, instansi pemerintah, dan terkadang pemangku kepentingan lainnya berbagi peran tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan kewenangan untuk mengelola kawasan konservasi. Pendekatan kolaboratif ini menawarkan beberapa manfaat utama:

- **Meningkatkan komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan** di antara para pemangku kepentingan, sehingga mendorong proses pengelolaan yang lebih padu.
- **Memanfaatkan pengetahuan dan antusiasme para pemangku kepentingan**, mendorong tindakan kolektif untuk mendukung pengelolaan kawasan lindung laut yang efektif, yang dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik.
- **Meningkatkan dukungan lokal jangka panjang**, yang menghasilkan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap peraturan dan peningkatan kontribusi, baik dalam bentuk barang maupun finansial, untuk mempertahankan program kawasan konservasi
- **Mendesentralisasikan sistem pengelolaan**, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terlokalisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan ini memanfaatkan struktur dan sumber daya pengelolaan *top-down* sekaligus menggabungkan pengetahuan, kebutuhan, dan kerja sama lokal dari pendekatan *bottom-up*. Pengelolaan bersama (*co-management*)

dapat meningkatkan kepatuhan dan keterlibatan lokal, sekaligus memastikan standar dan kebijakan konservasi terpenuhi, sehingga sangat mudah beradaptasi dengan berbagai konteks sosial dan ekologi.



Gambar 5. Ilustrasi pengelolaan bersama (*co-management*) yaitu pengelolaan kolaboratif antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya

Hasil penelitian dari Voorberg dan Van der Veer (2020) menunjukkan peluang pendekatan ini untuk keberhasilan upaya konservasi. Peran dari instansi pemerintah sebagai otoritas kebijakan dan regulasi tetap esensial. Membiarkan pengelolaan kawasan konservasi hanya kepada pemangku kepentingan lain saja tidak efektif untuk konservasi laut, dan bahkan dapat merugikan. Ditemukan bahwa **efektivitas tertinggi untuk pendekatan pengelolaan bersama (*co-management*) adalah jika merupakan bagian dari skema pengelolaan yang lebih luas dan terlembaga** (yaitu, bagian dari rencana aksi pengelolaan resmi).

Pelaksanaannya harus terkoordinasi dan terstruktur

Pojok Informasi: Awig-awig



Salah satu bentuk kelembagaan lokal adalah hukum adat yang disebut awig-awig. Awig-awig merupakan hukum yang dibentuk oleh masyarakat adat sebagai pedoman bertingkah laku dalam pergaulan hidup bermasyarakat (Astuti et al., 2011). Awig-awig berisi sekumpulan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. Sejumlah penelitian telah mengungkap efektivitas awig-awig dalam menjaga lingkungan laut:

- Di Kecamatan Gangga, Lombok Barat, terbentuknya awig-awig merupakan proses kesadaran kelompok masyarakat yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem perairan laut, sehingga awig-awig merupakan wujud strategi adaptasi masyarakat nelayan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Hasil menunjukkan bahwa pemberlakuan awig-awig telah meminimalisir konflik, baik konflik antar nelayan lokal yang disebabkan oleh perbedaan alat tangkap yang beroperasi di zona 3 mil, seperti alat tangkap tradisional dengan alat tangkap pukot cincin (*purse seine*) dan jaring insang (*gillnet*), maupun konflik antara nelayan lokal dengan nelayan luar (Solihin dan Satria, 2007).
- Pengelolaan Pantai Kedonganan, Bali diserahkan pemerintah daerah kepada masyarakat adat setempat namun tetap dalam pengawasan pemerintah. Awig-awig yang mengatur kehidupan masyarakat nelayan di sana terdiri atas tujuh aturan, diantaranya:
 1. Larangan menangkap ikan menggunakan pukot harimau, bom, potasium dan bahan kimia berbahaya lainnya.
 2. Larangan merusak terumbu karang secara sengaja.
 3. Larangan mengambil biota laut yang dilindungi.
 4. Larangan melaut pada Hari Raya Nyepi.
 5. Larangan melaut di sekitar pantai dan pesisir Kedonganan pada saat berlangsungnya upacara keagamaan.
 6. Larangan membuang sampah di sekitar pantai dan pesisir.
 7. Larangan melaut pada angin musim barat.

Diantara ketujuh peraturan, nomor 1 menjadi yang paling efektif. Efektivitasnya merupakan cerminan dari sosialisasi yang gencar dilakukan, petugas yang selalu mengadakan patroli, dan peningkatan kesadaran nelayan akan bahaya dari penggunaan alat-alat tersebut dan sanksi yang tegas (Widyastini dan Dharmawan, 2013).



Kegiatan Pembelajaran Interaktif: Diskusi strategi pelibatan pemangku kepentingan

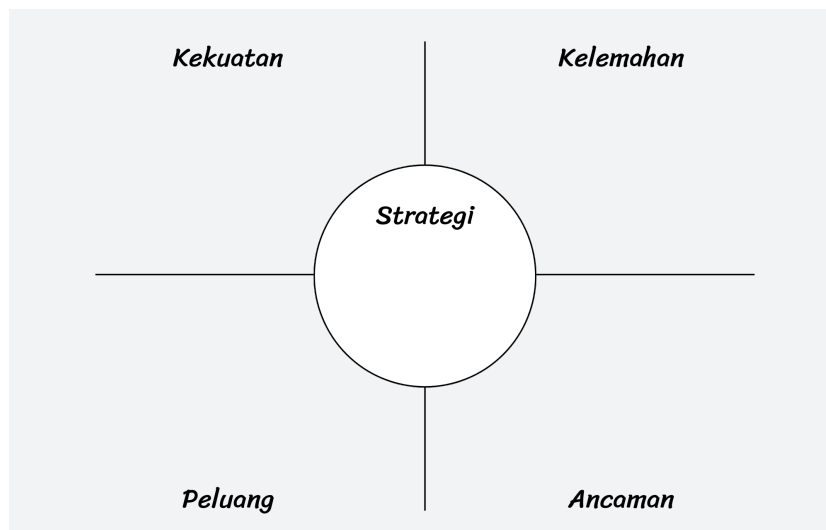
Bayangkan Anda adalah seorang pengelola kawasan konservasi yang ingin melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi untuk hiu paus di Teluk Saleh

Petunjuk:

1. Pilih satu pemangku kepentingan dari hasil matriks pada kegiatan sebelumnya.
2. Identifikasi dan analisis faktor-faktor utama yang dapat membentuk pendekatan ke pemangku kepentingan tersebut menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:
 - **Kekuatan (*Strength*):** Memahami aspek hubungan dan motivasi dengan pemangku kepentingan yang dapat memfasilitasi kolaborasi dengan mereka. Pertanyaan panduan:
 - a. Apa saja kepentingan atau nilai yang sama yang Anda miliki dengan pemangku kepentingan ini?
 - b. Apakah ada hubungan positif atau kepercayaan yang terjalin dengan pemangku kepentingan ini?
 - c. Sumber daya apa (misal, pengetahuan, pengaruh, jaringan) yang Anda miliki untuk mendukung hubungan kolaborasi?
 - **Kelemahan (*Weakness*):** Mengenali hambatan yang mungkin perlu ditangani. Pertanyaan panduan:
 - a. Apakah saat ini ada masalah/konflik dengan pemangku kepentingan ini?
 - b. Apakah Anda memiliki kekurangan sumber daya atau keahlian untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan?
 - **Peluang (*Opportunity*):** Mengidentifikasi faktor eksternal yang bisa memperkuat hubungan kolaborasi. Pertanyaan panduan:
 - a. Apa manfaat yang bisa didapatkan pemangku kepentingan dari kolaborasi ini?
 - b. Apakah ada kegiatan/perubahan/kesempatan mendatang yang dapat mendorong kolaborasi?
 - c. Bagaimana Anda bisa menyelaraskan tujuan Anda dengan pemangku kepentingan agar menciptakan manfaat bersama?

- **Ancaman (*Threat*):** Menyadari tantangan eksternal apapun yang dapat menghambat hubungan kolaborasi. Pertanyaan panduan:
 - a. Apakah ada kepentingan yang bersaing yang dapat menghalangi pemangku kepentingan?
 - b. Apakah ada pemangku kepentingan/pihak lain yang dapat membawa pengaruh negatif pada kolaborasi ini?
 - c. Risiko apa yang dapat timbul dari kolaborasi ini?

- 3. Berdasarkan hasil analisis Anda, tentukan satu strategi efektif untuk melibatkan pemangku kepentingan tersebut. Tuangkan hasil pada matriks di bawah:



Catatan Pelatihan:

Alat dan Bahan: Kertas A0 dengan gambar matriks SWOT (1 untuk satu kelompok; spidol/pena berwarna

Panduan: Instruktur dapat membagi peserta ke dalam kelompok kecil berisikan 3 - 4 orang. Arahkan peserta untuk memaparkan dan menjelaskan hasil mereka. Dorong peserta untuk memberikan saran/masukan untuk strategi yang dipaparkan oleh kelompok lain.

Pertanyaan panduan diskusi, namun tidak terbatas pada:

- Mengapa Anda memilih pemangku kepentingan tersebut?
- Hasil apa yang dapat dipetik dari matriks ini?
- Apakah strategi ini dapat diimplementasikan di Teluk Saleh?

Waktu: 20 menit + 10 menit diskusi

Lampiran

Glosarium

<p>Bottom-up approach (Pendekatan atas ke bawah)</p>	<p>Pendekatan yang berpusat pada pengambilan keputusan yang dipimpin oleh masyarakat; yang melibatkan pemangku kepentingan lokal seperti nelayan dan penduduk dalam perencanaan dan pengelolaan. Pendekatan ini mendorong kepemilikan dan kepatuhan masyarakat, tetapi dapat memakan waktu lama untuk mencapai konsensus.</p>
<p>Pemangku kepentingan (<i>Stakeholder</i>)</p>	<p>Setiap individu, kelompok, atau organisasi yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut di dalam kawasan konservasi. Pemangku kepentingan dapat mencakup masyarakat setempat, nelayan, pelaku wisata, lembaga pemerintah, dan organisasi konservasi.</p>
<p>Pengelolaan bersama (<i>Co-management</i>)</p>	<p>Konsep pengelolaan dimana terdapat pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan secara formal antara dua pihak atau lebih.</p>
<p>Pengelolaan berbasis masyarakat (<i>Community-based management</i>)</p>	<p>Pendekatan pengelolaan dimana masyarakat lokal atau setempat mengambil peran utama dalam mengelola kawasan konservasi.</p>
<p>Top-down approach (Pendekatan atas ke bawah)</p>	<p>Pendekatan yang didorong oleh pemerintah atau otoritas yang lebih tinggi; yang menetapkan aturan dan regulasi kawasan konservasi. Pendekatan ini memungkinkan adanya kebijakan dan dukungan pendanaan yang konsisten, namun masukan dari masyarakat/pemangku kepentingan lokal yang terbatas.</p>

Evaluasi Pembelajaran

Nama:

Tanggal:

Pilihan Ganda: Beri tanda silang pada satu pilihan yang paling tepat

1. Apa peran utama masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi? (5 poin)
 - a. Memberikan pengetahuan lokal atau historis tentang kawasan
 - b. Membuat kebijakan dan regulasi
 - c. Melaksanakan penelitian
 - d. Menyediakan sumber daya keuangan
2. Apa peran utama dari sektor swasta dalam pengelolaan kawasan konservasi? (5 poin)
 - a. Membuat kebijakan dan regulasi
 - b. Melaksanakan pemantauan kegiatan pemanfaatan
 - c. Memberikan pengetahuan lokal atau historis tentang kawasan
 - d. Mendorong investasi dalam pengembangan kawasan dan upaya konservasi
3. Mana yang BUKAN merupakan manfaat dari pengelolaan bersama (*co-management*)? (5 poin)
 - a. Meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan
 - b. Memanfaatkan pengetahuan dari para pemangku kepentingan
 - c. Meningkatkan kepercayaan antara pemangku kepentingan
 - d. Memusatkan pengelolaan hanya di satu pihak/lembaga

Benar atau Salah: Lingkari pilihan benar / salah sesuai dengan kalimat pernyataan di bawah

4. Pemangku kepentingan kunci adalah pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi terhadap kawasan konservasi (5 poin)

Benar / Salah
5. LSM dan peneliti berperan dalam mengumpulkan informasi tambahan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengelolaan KKP (5 poin)

Benar / Salah
6. Upaya pemantauan di dalam kawasan konservasi hanya dilakukan oleh instansi pemerintah (5 poin)

Benar / Salah

7. Pengelolaan kawasan konservasi yang dipimpin oleh masyarakat adalah contoh dari *top-down approach* (pendekatan atas ke bawah) (5 poin)

Benar / Salah

Isian Singkat

8. Sebutkan 3 manfaat dari pengelolaan bersama (*co-management*) untuk mengelola sebuah kawasan konservasi (15 poin)

9. Sebutkan setidaknya 3 pemangku kepentingan dan peran mereka dalam pengelolaan kawasan konservasi di daerah Anda! (15 poin)

Isian Panjang

10. Jika Anda adalah seorang pengelola kawasan konservasi, strategi apa yang Anda gunakan untuk melibatkan masyarakat lokal? Jelaskan! (35 poin)

Referensi

- Agardy, T., Bridgewater, P., Crosby, M. P., Day, J., Dayton, P. K., Kenchington, R., . . . Parks, J. E. (2003). Dangerous targets? unresolved issues and ideological clashes around marine protected areas. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 13, 353-367
- Astiti TIP, Windia W, Sudantra IK, Wijaatmaja IGM, Dewi AAIAA. (2011). *Implementasi Ajaran Tri Hita Karana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Beierle, T. C., & Cayford, J. (2002). *Democracy in practice: Public participation in environmental decisions*. Resources for the Future.
- Bottema, M. J., & Bush, S. R. (2012). The durability of private sector-led marine conservation: A case study of two entrepreneurial marine protected areas in Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 61, 38–48. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.01.004>
- Brumbaugh, D.R. (2017). *Co-Management of Marine Protected Areas: A Suggested Framework for The Bahamas*. Report to The Nature Conservancy, Northern Caribbean Program, Nassau, Bahamas. 32 pp.
- Carlson dan berks 2005
- Christie, P., McCay, B. J., Miller, M. L., Lowe, C., White, A. T., Stoffle, R., . . . Pomeroy, C. (2003). Toward developing a complete understanding: A social science research agenda for marine protected areas. *Fisheries*, 28(12), 22-25.
- Christie, P. (2004). Marine protected areas as biological successes and social failures in Southeast Asia. Paper presented at the American Fisheries Society Symposium, 42 155-164.
- Dalton, T., Forrester, G., & Pollnac, R. (2012). Participation, process quality, and performance of marine protected areas in the wider Caribbean. *Environmental Management*, 49, 1224-1237.
- Dietz, Thomas & Stern, Paul. (2008). *Public Participation Is Environmental Assessment and Decision Making*. Panel on Public Participation in Environmental Assessment and Decision Making. 10.17226/12434.
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Gaymer, C. F., Stadel, A. V., Ban, N. C., Cárcamo, P. F., Ierna, J., & Lieberknecht, L. M. (2014). Merging top-down and bottom-up approaches in marine protected areas planning: experiences from around the globe. *Aquatic*

Conservation Marine and Freshwater Ecosystems, 24(S2), 128–144.
<https://doi.org/10.1002/aqc.2508>

- Gusman, Alyandra & Supriyadi, Supriyadi. (2024). Analysis of Participatory Approaches of Community-Based Sustainable Marine Protected Area Management Groups. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 5. 342-350. 10.59141/jiss.v5i03.1026.
- Hooray and Bottorff, (2022). What Is A Stakeholder Analysis? Everything You Need To Know. Diakses 1 November 2024 dari <https://www.forbes.com/advisor/business/what-is-stakeholder-analysis/>
- Kriegl, M., Kluger, L. C., Holzkämper, E., Nagel, B., Kochalski, S., & Gorris, P. (2021). How Important are Social Networks in Times of Environmental Crises? *easy_social_sciences*, 66, 11-20. <https://doi.org/10.15464/easy.2021.002>
- Muhammad Mehedi Masud, Sharifah Muhairah Shahabudin, Angathevar Baskaran, Rulia Akhtar. (2022). Co-management approach to sustainable management of marine protected areas: The case of Malaysia, *Marine Policy*, Volume 138. 105010, ISSN 0308-597X, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105010>.
- Mindtools. (2024). Stakeholder Analysis. Diakses November 1, 2024 dari <https://www.mindtools.com/aol0rms/stakeholder-analysis>
- Newig, J., & Fritsch, O. (2009). More Input–Better output: Does citizen involvement improve environmental governance. In *Search of Legitimacy. Policy Making in Europe and the Challenge of Societal Complexity*, 205-224.
- Rabinowits, P. (2023). Identifying and Analyzing Stakeholders and Their Interests. Diakses November 1, 2024 dari <https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/encouraging-involvement/identify-stakeholders/main>
- Sayce, K., Shuman, C., Connor, D., Reisewitz, A., Pope, E., Miller-Henson, M., Poncelet, E., Monié, D., & Owens, B. (2012). Beyond traditional stakeholder engagement: Public participation roles in California’s statewide marine protected area planning process. *Ocean & Coastal Management*, 74, 57–66. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.06.012>
- Schmidt, Laura & S., Domtail & Klintonberg, Patrik & Gruber, Martin & Schmiedel, Ute & I., Zimmermann & Falk, Thomas. (2013). Transdisciplinary research and stakeholder involvement. A review of the TFO approach. *Biodiversity & Ecology*. 5. 195-212. 10.7809/b-e.00275.

- SolihinA., & SatriaA. (2007). Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1). <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i1.5937>
- Stakeholder Participation Toolkit for Identification, Designation and Management of Marine Protected Areas. RAC/SPA and IUCN-Med. Ed. RAC/SPA, Tunis. 30pp.
- Tractivity. (2024). What is Stakeholders Analysis? Definition, Examples, and Template. Diakses November 1, 2024 dari <https://www.tractivity.co.uk/blog/stakeholder-analysis#importance>
- Voorberg W, Van der Veer R. Co-Management as a Successful Strategy for Marine Conservation. (2020). *Journal of Marine Science and Engineering*; 8(7):491. <https://doi.org/10.3390/jmse8070491>
- Voyer, M., Gladstone, W., & Goodall, H. (2014). Understanding marine park opposition: The relationship between social impacts, environmental knowledge and motivation to fish. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 24, 441-462.
- Widyastini, T., A. H. Dharmawan. (2013). Efektivitas Awig-Awig dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pantai Kedonganan Bali. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1, 37-51.

Jawaban Evaluasi Pembelajaran:

1. A
2. D
3. D
4. Benar
5. Benar
6. Salah
7. Salah
8. Meningkatkan komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan antara pemangku kepentingan; mendorong tindakan kolektif; meningkatkan dukungan lokal jangka panjang; meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kawasan konservasi; mendesentralisasikan sistem pengelolaan
9. Beberapa contoh: Masyarakat lokal (memberikan pengetahuan lokal/tradisional); Instansi pemerintah (membuat kebijakan dan regulasi); Sektor perikanan - nelayan (meminimalkan dampak dari kegiatan perikanan)
10. Beberapa contoh: Lokakarya (workshop), konsultasi publik, pengambilan keputusan partisipatif; pelibatan dalam pengawasan kegiatan di dalam kawasan



**KONSERVASI
INDONESIA**

Konservasi Indonesia

Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 9
Jl. Buncit Raya No. 22 Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Indonesia, 12510



konservasi-id.org



[@konservasi_ind](https://www.instagram.com/konservasi_indonesia)



[@konservasiid](https://twitter.com/konservasiid)



[Konservasi Indonesia](https://www.facebook.com/konservasiindonesia)



[Konservasi Indonesia](https://www.youtube.com/konservasiindonesia)



[Konservasi Indonesia](https://www.linkedin.com/company/konservasiindonesia)